

2023



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)

KECAMATAN MANTUP KABUPATEN LAMONGAN

Jl. Ayam Alas No.45 Mantup

Email : mantup@lamongankab.go.id

Website : www.lamongankab.go.id

KODE POS : 62283

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan hidayahNya karena Kecamatan Kabupaten Lamongan telah berhasil menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2023 dengan tepat waktu.

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*), setiap kegiatan pemerintahan dan pembangunan perlu dinilai secara terukur tingkat keberhasilannya. Berdasarkan peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, yang didalamnya antara lain mewajibkan kepada pelaksana penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan untuk membuat Laporan Pertanggungjawaban Kinerjanya selama kurun waktu satu tahun dalam bentuk LKjIP (Laporan Kinerja Instansi Pemerintah).

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Mantup Kabupaten Lamongan Tahun 2023 ini sebagai perwujudan kewajiban suatu instansi Pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan selama Tahun 2023 serta diharapkan sekaligus dapat menjadi bahan informasi bagi berbagai pihak yang terkait dalam mengevaluasi pelaksanaan kinerja Kecamatan Mantup Kabupaten Lamongan sebagaimana yang tertuang dalam APBD Tahun Anggaran 2023.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Mantup Kabupaten Lamongan, semoga laporan ini dapat bermanfaat serta dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi upaya-upaya perbaikan dimasa yang akan datang.

Mantup, Januari 2024


SUWANTO SASTRODIHARJO, S.STP., M.M
Pembina
NIP. 19851010 200602 1 001

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik. Dari Visi Kabupaten Lamongan, Kecamatan Mantup Kabupaten Lamongan masuk kedalam Misi yang ke 5 (lima), yang kemudian untuk mencapai Misi tersebut, diuraikan melalui program dan kegiatan.

Dalam upaya mencapai tujuan yang telah ditetapkan Kecamatan Mantup Kabupaten Lamongan, pada Tahun Anggaran 2023 terdapat 2 (dua) sasaran strategis yaitu:

1. Meningkatnya Manajemen Internal Perangkat Daerah
2. Meningkatnya Pemberdayaan Desa

Dengan 2 (dua) Indikator Kinerja yaitu:

1. Nilai SAKIP Kecamatan, indikator ini tercapai dengan katagori sangat baik yaitu 83,34 dari target 81,14 atau dengan capaian 102,71%.
2. Jumlah Desa Maju, indikator ini tercapai dengan katagori sangat baik dengan dari target 10 Desa saat ini hanya tersisa 5 Desa Maju di Kecamatan Mantup dan 10 desa lainnya telah berstatus Mandiri.

Pada tahun 2023 Kecamatan Mantup Kabupaten Lamongan telah menggunakan anggaran sebesar Rp. 2.349.053.289,00 (Dua milyar tiga ratus empat puluh sembilan juta lima puluh tiga ribu dua ratus delapan puluh sembilan rupiah) secara efektif telah mewujudkan capaian Kinerja untuk menunjang pencapaian Visi dan Misi Kabupaten Lamongan. Berdasarkan pagu indikatif Renstra jumlah anggaran tersebut maka realisasi anggaran yang telah digunakan oleh Kecamatan Mantup Kabupaten Lamongan adalah 91,47% dari anggaran indikatif yang direncanakan, hal tersebut menunjukkan bahwa perencanaan Kecamatan Mantup Kabupaten Lamongan perlu dioptimal kembali agar lebih efektif dan efisien dalam meningkatkan kinerja yang mendukung pencapaian Visi dan Misi Kabupaten Lamongan.

Secara umum efektifitas anggaran terhadap capaian Sasaran Kecamatan Mantup Kabupaten Lamongan, dapat disimpulkan bahwa anggaran yang digunakan efektif terhadap capaian kinerja sasaran organisasi. Pelaksanaan kegiatan-kegiatan

Kecamatan Mantup Kabupaten Lamongan memiliki tingkat keberhasilan sesuai dengan harapan.

Pada akhirnya, semoga laporan ini dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi terhadap penyelenggaraan pemerintahan, khususnya penyelenggaraan urusan Kecamatan sebagai unsur pelaksana bidang Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan. Segala prestasi yang berhasil diraih tidak menyebabkan munculnya rasa bangga yang berlebihan sehingga melupakan tujuan awal untuk selalu berusaha memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Sebaliknya segala kekurangan yang masih dijumpai tidak menyebabkan lemahnya motivasi tetapi justru harus menjadi cambuk untuk bekerja lebih baik lagi di masa yang akan datang.

Mantup, Januari 2024



SUWANTO SASTRODIHARJO, S.STP., M.M

Pembina

NIP. 19851010 200602 1 001

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
KATA PENGANTAR.....	ii
IKHTISAR EKSEKUTIF	iii
DAFTAR ISI	v
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Tugas Pokok, Fungsi, dan Struktur Organisasi	2
1.3 Data Umum Organisasi	5
1.4 Sistematika Penyajian LKjIP.....	7
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA.....	9
2.1 Perencanaan Strategis	9
2.2 Rencana Kinerja, Program dan Kegiatan Tahun 2023	11
2.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2023	15
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	17
3.1 Capaian Kinerja Organisasi.....	17
3.2 Realisasi Anggaran Tahun 2023.....	23
BAB IV PENUTUP	26
4.1 Kesimpulan	26
4.2 Saran	27
LAMPIRAN.....	28

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Mantup Kabupaten Lamongan Tahun 2023 dilaksanakan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri PAN dan RB RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang didalamnya antara lain mewajibkan kepada pelaksana penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan untuk membuat Laporan Pertanggungjawaban Kinerjanya selama kurun waktu satu tahun dalam bentuk LKjIP (Laporan Kinerja Instansi Pemerintah).

Hal ini merupakan bagian dari implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah guna mendorong terwujudnya sebuah pemerintahan yang baik (*good governance*) di Indonesia. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah merupakan sebuah wujud kewajiban untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik.

Dengan disusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Mantup Kabupaten Lamongan diharapkan dapat:

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai oleh Kecamatan Mantup Kabupaten Lamongan.
2. Mendorong Kecamatan Mantup Kabupaten Lamongan didalam melaksanakan tugas dan fungsinya secara baik dan benar yang didasarkan pada peraturan perundangan, kebijakan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
3. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Kecamatan Mantup Kabupaten Lamongan untuk meningkatkan kinerjanya.

4. Memberikan kepercayaan kepada masyarakat terhadap Kecamatan Mantup Kabupaten Lamongan di dalam pelaksanaan program/kegiatan dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat.

1.2 TUGAS POKOK, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI

Kecamatan Mantup Kabupaten Lamongan dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 05 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Lamongan, selanjutnya ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati Lamongan Nomor 85 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Lamongan sebagai berikut:

A. Kedudukan

Kecamatan dibentuk sebagai unsur pelaksana dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, ketenteraman dan ketertiban umum, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa dan/atau kelurahan yang dipimpin oleh seorang Camat yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

B. Tugas Pokok dan wewenang

Kecamatan Mantup Kabupaten Lamongan mempunyai tugas memimpin, merencanakan, mengatur, melaksanakan dan mengendalikan serta mengoordinasikan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum dan melaksanakan kewenangan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati.

C. Fungsi

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana tersebut Kecamatan memiliki fungsi sebagai berikut:

1. Perumusan dan penetapan bahan penyusunan rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Strategis, Rencana Kerja, Rencana Kerja dan Anggaran, Dokumen Pelaksanaan Anggaran, Perjanjian Kinerja, LAKIP, Laporan Keuangan, LPPD dan LKPJ Kecamatan;

2. Perumusan dan penetapan kebijakan teknis rencana operasional berupa petunjuk teknis dan Standar Operasional Prosedur serta mengkoordinasikan pelaksanaan program dan kegiatan di lingkungan Kecamatan;
3. Penyelenggaraan koordinasi dengan instansi lain terkait pelaksanaan tugas Camat;
4. Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum di tingkat Kecamatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaan urusan pemerintahan umum;
5. Penyelenggaraan koordinasi kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat;
6. Penyelenggaraan koordinasi upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
7. Penyelenggaraan koordinasi penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
8. Penyelenggaraan koordinasi pemeliharaan prasana dan sarana pelayanan umum lingkup Kecamatan;
9. Penyelenggaraan koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan;
10. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
11. Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di Kecamatan, antara lain:
12. Penyelenggaraan perencanaan dan efektivitas kegiatan pelayanan kepada masyarakat di Kecamatan;
13. Penyelenggaraan fasilitas percepatan Standar Pelayanan Minimal di wilayah kecamatan.
14. Penyelenggaraan sebagian kewenangan yang dilimpahkan oleh bupati kepada Camat;
15. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

D. Struktur Organisasi

Dalam melaksanakan tugas, fungsi, susunan organisasi dan tata kerja tersebut, sesuai Peraturan Bupati Lamongan Nomor Nomor 85 Tahun 2020 susunan organisasi Kecamatan Mantup terdiri dari:

1. Camat.
2. Sekretariat.
 - a. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan.
 - b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
3. Seksi Pemerintahan.
4. Seksi Pelayanan Publik.
5. Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat.
6. Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum.

Adapun susunan organisasi Kecamatan Mantup Kabupaten Lamongan dalam bentuk bagan struktur adalah sebagai berikut:

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI KECAMATAN MANTUP KABUPATEN LAMONGAN



1.3 DATA UMUM ORGANISASI

A. Personil

Jumlah personil di lingkungan Kecamatan Mantup Kabupaten Lamongan sebanyak 23 Orang dengan rincian sebagai berikut:

1. Komposisi Pegawai Berdasarkan Status Kepegawaian

No	Status Kepegawaian	Jumlah	Prosentase
1	PNS	12	(52,17%)
3	Tenaga Kontrak Kerja	11	(47,83%)
	Jumlah	23	(100%)

2. Komposisi Pegawai Berdasarkan Golongan Ruang

No	Golongan Ruang	Jumlah	Prosentase
1	Golongan IV	3	(25%)
2	Golongan III	9	(75%)
	Jumlah	12	(100%)

3. Komposisi Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Golongan Ruang	Jumlah	Prosentase
1	SMP/Sederajat	0	(0%)
2	SMA/Sederajat	3	(13,04%)
3	D2	1	(4,35%)
4	S1	15	(65,22%)
5	S2	4	(17,39%)
	Jumlah	23	(100%)

4. Komposisi Pegawai Berdasarkan Gender

No	Golongan Ruang	Jumlah	Prosentase
1	Laki-laki	15	(65%)
2	Perempuan	8	(35%)
	Jumlah	23	(100%)

B. Sarana dan Prasarana

Kecamatan Mantup Kabupaten Lamongan telah dilengkapi Sarana dan Prasarana yang diharapkan mampu mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya sehingga mampu menciptakan suasana kerja dan lingkungan yang cukup kondusif Adapun jenis sarana dan prasarana yang dimiliki sampai saat ini, sebagaimana tabel berikut :

NO	NAMA	JUMLAH (UNIT)	KONDISI
1	Tanah	1	Baik
2	Gedung	5	Baik
3	Kendaraan Roda 4	1	Baik
4	Kendaraan Roda 2	7	Baik
5	AC	9	Baik
6	Alat Pemadam	1	Baik
7	Jenset	1	Baik
8	Komputer	9	Baik
9	Kulkas 1 Pintu	1	Baik
10	Kursi dan Meja Tamu	2	Baik
11	Kursi Kayu Panjang	3	Baik
12	Kursi Plastik	40	Baik
13	Kursi Rapat	40	Baik
14	Laptop	6	Baik
15	Lemari Arsip Besi	4	Baik
16	Lemari Arsip Kaca	6	Baik
17	Lemari Arsip Kayu	2	Baik
18	Meja dan Kursi Pejabat	6	Baik
19	Meja dan Kursi Staf	13	Baik
20	Meja Kayu Panjang	7	Baik
21	Meja Rapat	7	Baik
22	Mesin Ketik	1	Baik
23	Printer	8	Baik
24	Proyektor	1	Baik
25	Sound System	1	Baik

26	Televisi	2	Baik
27	<i>White Board</i>	3	Baik
28	<i>Wireless</i>	1	Baik

C. Pembiayaan

Program dan kegiatan yang direalisasikan oleh Kecamatan Mantup Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2023 telah melaksanakan sasaran indikator dengan 5 program, 12 kegiatan, dan 26 sub kegiatan dengan alokasi anggaran pembangunan sebesar Rp. 2.568.142.000,- dengan rincian Belanja Operasi sebesar Rp. 2.180.200.800,- dan Belanja Modal sebesar Rp.387.941.200,-. Adapun rincian belanja operasi terdiri dari Belanja Pegawai sebesar Rp. 1.475.290.000,- dan Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp. 704.910.800,-.

1.4 SISTEMATIKA PENYAJIAN LKjIP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Mantup di susun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN.

Pada Bab ini diuraikan mengenai latar belakang, tugas pokok dan fungsi, gambaran umum organisasi dan sistem penyajian LKjIP.

BAB II. PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA .

Pada Bab ini diuraikan tentang Rencana Strategis, Visi Kepala Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2016 – 2021 Dari Visi tersebut diatas perlu adanya strategi untuk mencapai tujuan, sasaran dan indikator sasaran serta program dan kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2023.

BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA

Pada Bab ini diuraikan tentang Pengukuran Kinerja, Evaluasi dan Analisis Akuntabilitas Kinerja Tahun 2023 dan Akuntabilitas Keuangan.

BAB IV. PENUTUP

Dalam Bab ini diuraikan simpulan atas capaian kinerja Kecamatan Mantup Kabupaten Lamongan Tahun 2023 dan saran langkah-langkah dimasa mendatang yang akan dilakukan untuk meningkatkan kinerja.

LAMPIRAN – LAMPIRAN

1. Matriks Rencana Strategis (RS) Tahun 2021 – 2026
2. Pengukuran Kinerja (PK) Tahun 2023
3. Perjanjian Kinerja Tahun 2023
4. Lampiran lainnya.

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

2.1 PERENCANAAN STRATEGIS

Rencana Strategis sebagai dokumen perencanaan strategis 5 (lima) tahunan, Renstra Kecamatan Mantup Tahun 2021-2026 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen-dokumen perencanaan lainnya. Hubungan antara Renstra Kecamatan Mantup tahun 2021-2026 dengan dokumen perencanaan lainnya adalah sebagai berikut.

1. Renstra Kecamatan Mantup tahun 2021-2026 merupakan penjabaran dan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lamongan tahun 2021-2026;
2. Renstra Kecamatan Mantup tahun 2021-2026 disusun dengan memperhatikan pokok-pokok arah kebijakan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2021-2026;
3. Renstra Kecamatan Mantup Tahun 2021-2026 mempertimbangkan arah pembangunan kewilayahan yang telah ditetapkan sebelumnya, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur Tahun 2011-2031 dan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 15 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lamongan 2011-2031;
4. Renstra Kecamatan Mantup Tahun 2016-2021 menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan Kecamatan Mantup Kabupaten Lamongan.

A. Visi dan Misi RPJMD Kabupaten Lamongan Tahun 2021-2026

Perumusan tujuan, sasaran, strategi, dan kebijakan Kecamatan Mantup Kabupaten Lamongan berlandaskan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lamongan Tahun 2021-2026. Kabupaten Lamongan mencetuskan visi dengan terjalannya sinergi yang dinamis antara masyarakat, Pemerintah Kabupaten dan seluruh stakeholder's dalam

merealisasikan dan semakin memantapkan pembangunan Kabupaten Lamongan secara komprehensif, dengan ditetapkan visi Kabupaten Lamongan Tahun 2021-2026, yaitu: **“Terwujudnya Kejayaan Lamongan yang Berkeadilan”**

Sebagai upaya dalam mewujudkan visi Kabupaten Lamongan telah dirumuskan dalam 5 (lima) misi sebagai berikut:

1. Mewujudkan Kemandirian Ekonomi Daerah Melalui Optimalisasi Potensi Unggulan Daerah.
2. Mewujudkan SDM Unggul, Berdaya Saing dan Berakhlak yang Responsif Terhadap Perubahan Zaman.
3. Mewujudkan Infrastruktur Handal dan Berkeadilan yang Berwawasan Lingkungan.
4. Mewujudkan Kehidupan Bermasyarakat yang Sejahtera, Religius Berbudaya, Aktif dalam Pembangunan, serta Lingkungan yang Aman dan Tenram.
5. Menghadirkan Tata Kelola Pemerintahan yang Dinamis, Serta Memberikan Pelayanan Publik yang Berkualitas sebagai Upaya Optimalisasi Reformasi Birokrasi.

Adapun misi yang terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan adalah Misi ke-5 (lima) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lamongan Tahun 2021-2026 yaitu **“Menghadirkan Tata Kelola Pemerintahan yang Dinamis, Serta Memberikan Pelayanan Publik yang Berkualitas sebagai Upaya Optimalisasi Reformasi Birokrasi”**.

B. Tujuan, Sasaran dan Indikator Sasaran.

Untuk mewujudkan visi Kepala Daerah periode 2021–2026 melalui pelaksanaan misi yang telah ditetapkan tersebut diatas, maka dirumuskan tujuan dan sasaran yang akan dicapai pada setiap misi. Tujuan ini dirumuskan untuk memberikan arahan bagi pelaksanaan setiap urusan baik urusan wajib maupun urusan pilihan yang dilakukan oleh Kecamatan Mantup Kabupaten Lamongan. Sedangkan sasaran merupakan hasil yang akan dicapai secara nyata, spesifik, terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan, dalam kurun waktu tertentu/tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan. Tujuan,

sasaran dan indikator sasaran Kecamatan Mantup Tahun 2021-2026 dijabarkan sebagai berikut:

1. Tujuan

Kecamatan Mantup dalam rangka mendukung pencapaian Misi ke-5 RPJMD Kabupaten Lamongan Tahun 2021-2026 menetapkan 2 tujuan sebagai berikut:

No.	Tujuan	Indikator Tujuan
1	Meningkatkan Pelayanan Publik yang Inovatif	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
2	Meningkatkan Kemandirian Desa	Jumlah Desa Mandiri

2. Sasaran

Dari tujuan tersebut Kecamatan Mantup mempunyai 2 (dua) sasaran yang merupakan bagian yang integral dalam perencanaan strategis. Sasaran Kecamatan Mantup Kabupaten Lamongan dan indikatornya sebagai berikut:

No.	Sasaran	Indikator Sasaran
1	Meningkatnya Manajemen Internal Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Kecamatan
2	Meningkatnya Pemberdayaan Desa	Jumlah Desa Maju

2.2 Rencana Kinerja, Program dan Kegiatan Tahun 2023

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Kecamatan Mantup Kabupaten Lamongan untuk tahun 2023 diturunkan dari Renstra Kecamatan Mantup Kabupaten Lamongan Tahun 2021- 2026.

RKA (Rencana Kerja Anggaran) disusun mengacu kepada klasifikasi anggaran yaitu belanja daerah menurut organisasi, fungsi, program, kegiatan dan jenis belanja. Jadi RKT memuat rencana capaian kinerja dari Renstra yang bersifat tahunan, yaitu target-target kinerja output dari setiap kegiatan, target outcome dari setiap sasaran dalam mendukung tujuan.

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Kecamatan Mantup untuk tahun 2023, disajikan di dalam Format Rencana Kinerja Tahunan (RKT). Terkait dengan

rencana kinerja tahunan, supaya rencana/target capaian kinerja yang tercantum di dalam Rencana Kinerja Tahunan dapat terukur, maka disusun indikator kinerja yaitu indikator output dan outcome yang disusun sesuai dengan alokasi anggaran kegiatan berdasarkan DPA Awal tahun 2023. Komponen rencana kinerja tahunan tahun 2023 yang disusun berdasarkan Renstra secara rinci memuat tentang tujuan, program, sasaran/ kegiatan, output dan indikator output, serta outcome dan indikator outcome..

Berikut akan disampaikan mengenai rencana kinerja tahun 2023 baik berupa sasaran beserta indikator kinerja serta program dan kegiatan yang direncanakan pada tahun 2023 yang tertuang dalam rencana kinerja tahun 2023:

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) KECAMATAN MANTUP 2023

No	Sasaran Srategis	Indikator Sasaran	Target	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan
1	Meningkatnya Manajemen Internal Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Kecamatan	81,14	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	IKM Kecamatan	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja yang disusun tepat waktu
						Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan keuangan yang disusun tepat waktu
						Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Prosentase pegawai yang mendapatkan layanan kepegawaian dengan baik
						Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah laporan persediaan barang jasa yang tepat waktu
						Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan daerah	Prosentase ketersediaan sarana dan prasarana yang dibutuhkan
						Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase layanan jasa penunjang yang tersedia dengan baik
						Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik
2	Meningkatnya Pemberdayaan Desa	Jumlah Desa Maju	10 Desa	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Penyelenggaraan Pelayanan Publik yang Tepat Waktu	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan Oleh Unit Kerja yang Ada di Kecamatan	Jumlah Koordinasi/Fasilitasi Pelayanan Publik Kecamatan
				PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Desa yang Melaksanakan Pemberdayaan Terhadap Masyarakat	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Desa yang Koordinasi Pemberdayaan Desa
						Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah pemberdayaan masyarakat melalui gerakan PKK yang dilaksanakan
PROGRAM PENYELENGGARAAN	Persentase Urusan Pemerintahan Umum yang Diselenggarakan	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai	Jumlah Koordinasi Urusan Pemerintahan Umum				

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) KECAMATAN MANTUP 2023

				URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		Penugasan Kepala Daerah	
				PROGRAM PEMBINAAN DAN PEGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa Naik Kelas	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Desa yang Dilakukan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

2.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2023

Perjanjian kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Tujuan khusus perjanjian kinerja antara lain adalah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur; sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah; sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi; menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur; dan sebagai dasar pemberian reward atau penghargaan dan sanksi.

Kecamatan Mantup Kabupaten Lamongan telah membuat perjanjian kinerja tahun 2023 secara berjenjang sesuai dengan kedudukan, tugas, dan fungsi yang ada. Perjanjian kinerja ini merupakan tolok ukur evaluasi akuntabilitas kinerja pada akhir tahun 2023 dalam upaya pencapaian sasaran dan tujuan. Penyusunan Perjanjian Kinerja Kecamatan Mantup Kabupaten Lamongan Tahun 2023 mengacu pada dokumen Renstra Kecamatan Mantup Kabupaten Lamongan Tahun 2021-2026, dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2023, dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun 2023, dan dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2023. Adapun penyajian Perjanjian Kinerja (Penetapan Kinerja) secara ringkas dan terinci dapat dilihat pada tabel berikut:

NO	SARARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya Manajemen Internal Perangkat Daerah	Nilai IKM	83,85
		Nilai SAKIP Kecamatan	81,14 (A)
2	Meningkatnya Pemberdayaan Desa	Jumlah Desa Mandiri	3 Desa
		Jumlah Desa Maju	5 Desa
		IKM Kecamatan	86,00
		Persentase Penyelenggaraan Pelayanan Publik yang Tepat Waktu	100%
		Persentase Desa yang Melaksanakan Pemberdayaan Terhadap Masyarakat	100%
		Persentase Urusan Pemerintahan Umum yang Diselenggarakan	100%
		Persentase Desa Naik Kelas	33,33%

NO	PROGRAM	APBD 2023	APBD PERUBAHAN 2023
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 2.350.907.600,-	Rp. 2.465.489.250,-
2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Rp. 26.241.400,-	Rp. 22.231.600,-
3	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Rp. 55.240.750,-	Rp. 38.065.750,-
4	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Rp. 13.279.600,-	Rp. 11.072.600,-
5	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Rp. 36.485.650,-	Rp. 31.282.800,-
JUMLAH		Rp. 2.482.155.000,-	Rp. 2.568.142.000,-

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

A. Pencapaian Kinerja

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah. Kecamatan Mantup Kabupaten Lamongan melaksanakan pengukuran kinerja terhadap Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Kecamatan Mantup tahun 2023. Hasil pengukuran diperoleh dari perbandingan antara target dan realisasi kinerja pada tahun 2023 sebagai berikut:

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2023		
			Target	Realisasi	Capaian
1	Nilai IKM	Indeks	83,85	-	-
2	Jumlah Desa Mandiri	Jumlah	3 Desa	10 Desa	333,33%
3	Nilai SAKIP Kecamatan	Nilai	81,14	83,34	102,71%
4	Jumlah Desa Maju	Jumlah	10 Desa	5 Desa	150%

Dari Tabel di atas terlihat bahwa pada Sasaran Indikator Kinerja Utama, semua indikator tercapai sesuai dengan target yang ditetapkan. Pertama ialah indikator kinerja Nilai IKM dengan target kinerja 83,85 pada tahun 2023 terealisasi sesuai dengan target, indikator kinerja kedua yaitu Jumlah Desa Mandiri dengan target 3 Desa telah tercapai melebihi target yakni sebesar 333,33%, sedangkan untuk indikator kinerja ketiga yaitu Nilai SAKIP Kecamatan dengan target nilai 81,14 telah tercapai sebesar 83,34 atau melebihi target sebesar 102,71%, begitu pula dengan indikator kinerja ke empat yaitu Jumlah Desa Maju dengan target 10 Desa saat ini hanya tersisa 5 Desa Maju di Kecamatan Mantup dan 10 desa lainnya telah berstatus Mandiri.

B. Perbandingan Realisasi Kinerja s/d Periode RPJMD/Renstra

Perbandingan capaian kinerja Kecamatan Mantup Tahun 2023 dengan tahun-tahun sebelumnya (periode Renstra 2021-2026) dapat dilihat dalam tabel berikut:

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) KECAMATAN MANTUP 2023

No	Tujuan/Sasaran	Indikator	Target Kinerja Sasaran Tahun Ke-					Capaian Kinerja Sasaran Tahun Ke-	
			2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023
1	Meningkatkan Pelayanan Publik yang Inovatif	Nilai IKM	83,22	83,85	84,48	85,11	85,73	N/A	N/A
2	Meningkatkan Kemandirian Desa	Jumlah Desa Mandiri	2	3	4	5	6	2	10
3	Meningkatnya Manajemen Internal Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Kecamatan	81,04	81,14	81,24	81,34	81,44	82,09	83,34
4	Meningkatnya Pemberdayaan Desa	Jumlah Desa Maju	10	10	11	12	13	13	5

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwasanya tren target Renstra yang naik dapat diikuti dengan capaian target yang naik pula di setiap tahunnya.

**C. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Standar Nasional
(Jika Ada/Khusus Bagi PD yang memiliki SPM)**

NIHIL

D. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternative Solusi yang Telah Dilakukan

Untuk mengetahui penyebab keberhasilan / kegagalan atau peningkatan / penurunan program, kegiatan dan efisiensi penggunaan sumber daya (Dana, Sarana Prasarana dan SDM) yang telah dilaksanakan oleh Kecamatan Mantup Kabupaten Lamongan selama 1 (satu) tahun, maka perlu dilakukan Analisis kesesuaian kinerja agar dapat diketahui tingkat keberhasilan / kegagalan dan peningkatan / penurunan serta alternatif solusi yang dilakukan sebagai evaluasi kinerja.

Keberhasilan kinerja yang dilaksanakan oleh Kecamatan Mantup pada tahun anggaran 2023, yang meliputi 5 Program, 12 Kegiatan dan 26 Sub Kegiatan didukung oleh beberapa faktor antara lain:

1. Komitmen dan semangat kerja yang tinggi dari semua Pegawai Kecamatan.
2. Hubungan kerja dan koordinasi yang baik antara pimpinan, pejabat struktural dan para staf Kecamatan.
3. Penggunaan anggaran secara efektif dan efisien
4. Adanya kerjasama lintas sektoral yang sudah terjalin dengan baik.
5. Adanya dukungan, partisipasi dan komunikasi yang baik dengan berbagai elemen tokoh masyarakat dalam melaksanakan kegiatan di wilayah.

Namun dalam pelaksanaan masih terdapat permasalahan yang dihadapi, yaitu:

1. Keterbatasan Jumlah SDM/Personil.
2. Keterbatasan sarana dan prasarana penunjang kegiatan.
3. Pelaksanaan Dana Desa masih memerlukan pendampingan dari OPD teknis yang terkait.

Untuk menindaklanjuti permasalahan tersebut maka perlu dilakukan usaha-usaha sebagai berikut:

1. Menambah jumlah tenaga teknis sampai ke level Desa dan memberdayakan serta mengoptimalkan keberadaan anggota Linmas.
2. Pengadaan sarana dan prasarana penunjang
3. Mengusulkan kepada OPD teknis yang terkait untuk melaksanakan Bimbingan Teknis terkait pengelolaan Dana Desa.

E. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Dalam mencapai target Tahun 2023 Kecamatan Mantup Kabupaten Lamongan diperlukan dukungan sumber daya baik SDM, sarana prasarana maupun dana yang cukup. SDM yang ada di Kecamatan Mantup saat ini berjumlah 23 Orang dengan total PNS 12 orang dan sisanya Tenaga Kontrak Kerja sehingga dirasa masih sangat terbatas sehingga sering terjadi tumpang tindih tugas terhadap satu pegawai karena keterbatasan jumlah personil di setiap bagian maupun seksi yang mengakibatkan penyelenggaraan urusan pemerintahan tidak berjalan dengan lancar dan sering terjadi keterlambatan.

Sarana dan prasarana pendukung yang ada dioptimalkan agar dapat mencapai target kinerja sasaran program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan baik RPJMD, Renstra-PD maupun Standar Operasional Prosedur (SOP) guna memberikan kelancaran dalam melayani masyarakat.

Untuk mengukur efisiensi anggaran yang telah dialokasikan, maka dilakukan keselarasan antara sasaran yang ditetapkan dengan program dan kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2023, selanjutnya sumber daya biaya yang tersedia sebesar Rp. 2.568.142.000,00 telah dilakukan efisiensi dalam penggunaannya hanya sebesar Rp. 2.349.053.289,00 atau 91,47%, sisa dana sebesar Rp. 219.088.711,00 atau 8,53% yang merupakan SILPA di Kas Daerah.

Adapun alokasi per sasaran pembangunan dapat dilihat pada tabel dibawan ini:

Indikator	Anggaran	Realisasi Anggaran	Capaian (%)
Nilai IKM	2.465.489.250,00	2.289.197.289,00	92,85%
Nilai SAKIP Kecamatan			
Jumlah Desa Mandiri	102.652.750,00	59.856.000,00	58,31%
Jumlah Desa Maju			

Indikator	% Capaian Kinerja	% Capaian Anggaran	% Tingkat Efisiensi
Nilai IKM	100%	92,85%	7,15%
Nilai SAKIP Kecamatan	102,71%	92,85%	9,86%
Jumlah Desa Mandiri	333,33%	58,31%	275,02%
Jumlah Desa Maju	150%	58,31%	91,69%

Dari Tabel diatas dapat diketahui anggaran yang direncanakan telah dimanfaatkan untuk pencapaian sasaran organisasi dan tingkat efisisensi yang telah dilakukan oleh Kecamatan Mantup Kabupaten Lamongan pada tahun 2023.

F. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan/Kegagalan Penyampaian Pernyataan Kinerja

Program dan Kegiatan Kecamatan Mantup Kabupaten Lamongan Tahun 2023 yang di breakdown kedalam 4 (empat) program utama dengan 5 (lima) Kegiatan dan 7 (tujuh) Sub Kegiatan serta 1 (satu) program penunjang dengan 7 (tujuh) Kegiatan dan 19 Sub Kegiatan. Kesemuanya merupakan program dan kegiatan yang mendukung tercapainya tujuan dan indikator kinerja yang tercantum dalam Renstra Kecamatan Mantup Kabupaten Lamongan yaitu Nilai IKM dan Jumlah Desa Mandiri dengan 2 sasaran dan 2 indikator yaitu: Nilai SAKIP Kecamatan dan Jumlah Desa Maju.

3.2 REALISASI ANGGARAN TAHUN 2023

Akuntabilitas keuangan merupakan sarana pengukuran dalam alokasi dana yang mendukung pencapaian sasaran dengan indikator sasaran program dan pencapaian kegiatan dengan indikator kinerja, meliputi output dan outcome. Selanjutnya dalam rangka Pencapaian target kinerja Tahun 2023 Kecamatan Mantup Kabupaten Lamongan melaksanakan 2 Sasaran utama dengan 5 Program 12 Kegiatan dan 26 Sub Kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 2.568.142.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 2.349.053.289,00 atau 91,47%, dimana sisa anggaran sebesar Rp. 219.088.711,00 atau 8,53% yang merupakan SILPA di Kas Daerah. Adapun rincian penggunaan anggaran pembangunan sebagai berikut:

Tabel Realisasi Anggaran Tahun 2023

Program/Kegiatan	APBD	P-APBD	Realisasi	%	Sisa
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	2.350.907.600	2.465.489.250	2.289.197.289	92,85	176.291.961
<i>Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	35.754.000	32.140.100	24.656.000	76,71	7.484.100
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	12.534.200	11.119.700	8.110.000	72,93	3.009.700
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	10.623.200	10.088.600	7.390.000	73,25	2.698.600
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12.596.600	10.931.800	9.156.000	83,76	1.775.800
<i>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>	1.442.759.650	1.496.751.550	1.461.805.374	97,67	34.946.176
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.418.533.100	1.475.290.000	1.453.854.374	98,55	21.435.626
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	13.124.150	11.284.150	4.472.500	39,64	6.811.650
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	11.102.400	10.177.400	3.478.500	34,18	6.698.900
<i>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</i>	22.265.400	21.763.500	14.980.000	68,83	6.783.500
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	22.265.400	21.763.500	14.980.000	68,83	6.783.500
<i>Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>	70.560.000	73.897.900	50.398.800	68,20	23.499.100
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.012.700	5.038.700	3.888.900	77,18	1.149.800

Penyediaan Bahan Logistik Kantor	23.226.800	24.159.600	17.305.400	71,63	6.854.200
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	12.125.000	13.375.000	7.602.500	56,84	5.772.500
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	4.000.000	4.000.000	1.800.000	45,00	2.200.000
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	27.195.500	27.324.600	19.802.000	72,47	7.522.600
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan daerah	51.044.200	95.634.200	14.062.000	14,70	81.572.200
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	51.044.200	95.634.200	14.062.000	14,70	81.572.200
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	371.607.000	365.107.000	358.546.815	98,20	6.560.185
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	37.269.000	29.769.000	27.985.395	94,01	1.783.605
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12.490.000	13.490.000	11.190.000	82,95	2.300.000
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	321.848.000	321.848.000	319.371.420	99,23	2.476.580
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	356.917.350	380.195.000	364.748.300	95,94	15.446.700
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	2.000.000	2.000.000	1.289.300	64,47	710.700
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	29.992.500	29.992.500	17.775.000	59,26	12.217.500
Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	324.924.850	348.202.500	345.684.000	99,28	2.518.500
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	26.241.400	22.231.600	3.704.000	16,66	18.527.600
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja yang Ada di Wilayah Kecamatan	26.241.400	22.231.600	3.704.000	16,66	18.527.600
Peningkatan Efektivitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	26.241.400	22.231.600	3.704.000	16,66	18.527.600
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	55.240.750	38.065.750	30.877.000	81,11	7.188.750
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	46.240.750	29.065.750	23.874.000	82,14	5.191.750
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	46.240.750	29.065.750	23.874.000	82,14	5.191.750

<i>Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan</i>	9.000.000	9.000.000	7003000	77,81	1997000
Peningkatan Ketahanan Pangan Kelluarga	9.000.000	9.000.000	7.003.000	77,81	1.997.000
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	13.279.600	11.072.600	-	-	11.072.600
<i>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah</i>	13.279.600	11.072.600	-	-	11.072.600
Penganganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-undangan	13.279.600	11.072.600	-	-	11.072.600
PROGRAM PEMBINAAN DAN PEGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	36.485.650	31.282.800	25.275.000	80,80	6.007.800
<i>Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</i>	36.485.650	31.282.800	25.275.000	80,80	6.007.800
Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	12.982.400	10.775.400	8.650.000	80,28	2.125.400
Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	13.389.000	10.928.000	9.433.000	86,32	1.495.000
Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	10.114.250	9.579.400	7.192.000	75,08	2.387.400

BAB IV

PENUTUP

4.1 KESIMPULAN

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Mantup Kabupaten Lamongan Tahun 2023 ini merupakan pertanggung jawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (*Good Governance*) Kecamatan Mantup Kabupaten Lamongan Tahun 2023. Pembuatan LKjIP ini merupakan langkah yang baik dalam memenuhi harapan Perpres No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagaimana diharapkan oleh semua pihak.

LKjIP Kecamatan Mantup Kabupaten Lamongan Tahun 2023 ini dapat menggambarkan kinerja Kecamatan Mantup Kabupaten Lamongan dan Evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan, maupun kinerja sasaran, juga dilaporkan analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan.

Dalam tahun 2023 Kecamatan Mantup Kabupaten Lamongan menetapkan sebanyak 2 (dua) sasaran dengan 2 (dua) indikator kinerja sesuai dengan Rencana Kinerja Tahunan dan Dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2023 yang ingin dicapai. Secara rinci pencapaian tujuan dan sasaran dapat dijelaskan sebagai berikut: Tujuan dengan indikator Nilai IKM dan Jumlah Desa Mandiri, sementara sasaran dengan indikator Nilai SAKIP Kecamatan dan Jumlah Desa Maju.

Pada Tahun Anggaran 2023 untuk pelaksanaan program dan kegiatan pada Kecamatan Mantup Kabupaten Lamongan dalam rangka mencapai target kinerja yang ingin dicapai dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran pembangunan sebesar Rp. 2.568.142.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 2.349.053.289,00 atau 91,47%, dimana sisa anggaran sebesar Rp. 219.088.711,00 atau 8,53% yang merupakan SILPA di kas Daerah. rincian Belanja Operasi sebesar Rp. 2.180.200.800,- dan Belanja Modal sebesar Rp. 387.941.200,-. Adapun rincian

belanja operasi terdiri dari Belanja Pegawai sebesar Rp. 1.475.290.000,- dan Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp. 704.910.800,-.

Berdasarkan pagu indikatif Renstra jumlah anggaran tersebut maka realisasi anggaran yang telah digunakan oleh Kecamatan Mantup Kabupaten Lamongan adalah 95,63% dari anggaran indikatif yang direncanakan, hal tersebut menunjukkan bahwa perencanaan Kecamatan Mantup Kabupaten Lamongan perlu dioptimalkan kembali agar lebih efektif dan efisien dalam meningkatkan kinerja yang mendukung pencapaian Visi dan Misi Kabupaten Lamongan.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Mantup Kabupaten Lamongan ini, diharapkan dapat memberikan gambaran Kinerja Kecamatan Mantup Kabupaten Lamongan kepada pihak-pihak terkait baik sebagai *stakeholders* ataupun pihak lain yang telah mengambil bagian dengan berpartisipasi aktif untuk membangun Kabupaten Lamongan.

4.2 SARAN

penyusunan LKjIP Kecamatan Mantup Kabupaten Lamongan ini masih jauh dari sempurna, sehingga masih perlu adanya perbaikan - perbaikan, baik format penyajian maupun dalam pengkajian permasalahan - permasalahan yang ada, maka masih perlu adanya pembinaan guna penyempurnaan.

Mantup, Januari 2024



SUWANTO SASTRODIHARJO, S.STP., M.M
Pembina
NIP. 19851010 200602 1 001

LAMPIRAN

MATRIKS RENSTRA KECAMATAN MANTUP TAHUN 2021-2026

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN / SASARAN	KONDISI AWAL KINERJA	TARGET KINERJA TUJUAN ATAU SASARAN TAHUN KE-					KONDISI AKHIR
				2020	2022	2023	2024	2025	2026	
1	Meningkatkan Pelayanan Publik yang Inovatif	-	Nilai IKM Kecamatan	81,78	83,22	83,85	84,48	85,11	85,73	85,73
		Meningkatnya Manajemen Internal Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Kecamatan	80,94	81,04	81,14	81,24	81,34	81,44	81,44
2	Meningkatkan Kemadirian Desa	-	Jumlah Desa Mandiri	0	2	3	4	5	6	6
		Meningkatnya Pemberdayaan Desa	Jumlah Desa Maju	9	10	10	11	12	13	13

PENYELARASAN TUJUAN DAN SASARAN, FORMULASI, SUMBER DATA, DAN PENETAPAN TARGET

Tujuan 1	Indikator Kinerja Tujuan	Formulasi	Definisi Operasional	Kondisi Awal	Kondisi Akhir
Meningkatkan Pelayanan Publik yang Inovatif	Indek Kepuasan Masyarakat (IKM)	Melakukan Survey Pelayanan Internal, kemudian dilakukan perhitungan $SKM = \frac{\text{Total dari nilai persepsi per unsur}}{\text{Total unsur yang terisi}} \times \text{Nilai Penimbang}$	Melakukan survey terhadap 9 variabel pelayanan berupa : 1. Persyaratan; 2. Sistem, Mekanisme, dan Prosedur; 3. Waktu Penyelesaian; 4. Biaya/Tarif; 5. Produk spesifikasi jenis pelayanan; 6. Kompetensi pelaksana; 7. Perilaku Pelaksana; 8. Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan; serta 9. Sarana dan prasarana.	81,78	85,73

Sasaran ke-1 : Meningkatnya Manajemen Internal Perangkat Daerah

Indikator	Formulasi	Definisi Operasional	Kondisi Awal 2021	Target Kinerja					Kondisi Akhir
				2022	2023	2024	2025	2026	
Nilai SAKIP Kecamatan	Perhitungan Inspektorat	Nilai SAKIP merupakan akumulasi penilaian dari komponen manajemen kinerja yang dievaluasi yaitu Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, Evaluasi Internal dan Pencapaian Kinerja. Nilai SAKIP PD dikeluarkan oleh Inspektorat	80,94	81,04	81,14	81,24	81,34	81,44	81,44

Tujuan 2	Indikator Kinerja Tujuan	Formulasi	Definisi Operasional	Kondisi Awal	Kondisi Akhir
Meningkatkan Kemandirian Desa	Prosentase peningkatan jumlah Desa Mandiri	Jumlah Desa Mandiri	Indikator ini menghitung capaian peningkatan jumlah Desa Mandiri setiap tahunnya	0	6

Sasaran ke-2 : Meningkatnya Pemberdayaan Desa

Indikator	Formulasi	Definisi Operasional	Kondisi Awal 2021	Target Kinerja					Kondisi Akhir
				2022	2023	2024	2025	2026	
Jumlah Desa Maju	Jumlah Desa Maju	Indikator ini menghitung jumlah Desa Maju setiap tahunnya	9 Desa	10 Desa	10 Desa	11 Desa	12 Desa	13 Desa	13 Desa

TABEL RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, DAN PENDANAAN OPD KECAMATAN MANTUP KABUPATEN LAMONGAN

TUJUAN	SASARN	KODE				PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN (2021)	TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		UNIT KERJA PERANGKAT AT DAERAH PENANG GUNGJAWAB	LOKASI				
		TARGET	Rp.	TARGET	Rp.				TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.						
Meningkatkan Pelayanan Publik yang Inovatif	Meningkatnya Manajemen Internal Perangkat Daerah	7	0	0		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	IKM Kecamatan	80,20	85,00	2.480.833.300	86,00	2.386.859.335	87,00	2.415.788.070	88,00	2.445.912.947	89,00	2.477.294.010	89,00	2.477.294.010	Kecamatan Mantup	Kecamatan Mantup				
		7	0	0	2		0	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja yang Disusun Tepat Waktu	6 Dokumen	6 Dokumen	65.000.000	6 Dokumen	62.535.715	6 Dokumen	63.293.647	6 Dokumen	64.082.919	6 Dokumen	64.905.103	6 Dokumen	64.905.103	Kecamatan Mantup	Kecamatan Mantup		
		7	0	0	2		0	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Keuangan yang Disusun Tepat Waktu	22 Pegawai	22 Pegawai	1.716.007.900	22 Pegawai	1.650.990.602	22 Pegawai	1.607.000.608	22 Pegawai	1.691.837.985	22 Pegawai	1.713.544.267	22 Pegawai	1.713.544.267	Kecamatan Mantup	Kecamatan Mantup		
		7	0	0	2		0	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Prosentase Pegawai yang Mendapatkan Layanan Kepegawaian dengan Baik	100%	100%	25.000.000	100%	24.107.279	100%	24.399.460	100%	24.703.721	100%	25.020.670	100%	25.020.670	Kecamatan Mantup	Kecamatan Mantup		
		7	0	0	2		0	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Persediaan Barang dan Jasa yang Tepat Waktu	5 Rekening	5 Rekening	89.638.200	5 Rekening	86.165.622	5 Rekening	87.209.949	5 Rekening	88.297.457	5 Rekening	89.430.314	5 Rekening	89.430.314	5 Rekening	89.430.314	Kecamatan Mantup	Kecamatan Mantup
		7	0	0	2		0	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Prosentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana yang Dibutuhkan	100%	100%	62.811.200	100%	60.387.541	100%	61.119.438	100%	61.881.598	100%	62.675.538	100%	62.675.538	Kecamatan Mantup	Kecamatan Mantup		

7	0	0	2	0	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Desa yang Dilakukan Koordinasi dalam Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	0	0	0	15 Desa	10.000.000	15 Desa	10.121.200	15 Desa	10.247.411	15 Desa	10.378.886	15 Desa	10.378.886	Kecamatan Mantup	Kecamatan Mantup
7	0	0			PROGRAM PENYELENGGA RAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Urusan Pemerintahan Umum yang Diselenggarakan	100%	100%	17.000.000	100%	16.356.040	100%	16.554.275	100%	16.760.707	100%	16.975.747	100%	0	Kecamatan Mantup	Kecamatan Mantup
7	0	0	2	0	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Koordinasi Urusan Pemerintahan Umum	4 Rapat	4 Rapat	17.000.000	4 Rapat	16.356.040	4 Rapat	16.554.275	4 Rapat	16.760.707	4 Rapat	16.975.747	4 Rapat	0	Kecamatan Mantup	Kecamatan Mantup
7	0	0			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa naik Kelas	20,00%	26,67%	48.000.800	33,33%	46.182.530	40,00%	46.742.262	46,67%	47.325.138	53,33%	47.932.319	53,33%	47.932.319	Kecamatan Mantup	Kecamatan Mantup
7	0	0	2	0	Fasilitasi, Rekomendasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Desa yang Dilakukan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	15 Desa	15 Desa	48.000.800	15 Desa	46.182.530	15 Desa	46.742.262	15 Desa	47.325.138	15 Desa	47.932.319	15 Desa	47.932.319	Kecamatan Mantup	Kecamatan Mantup



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
KECAMATAN MANTUP KABUPATEN LAMONGAN**

Dalam rangka mewujudkan manajemen Pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

N a m a : SUWANTO SASTRODIHARJO, S.STP., M.M.

Jabatan : Camat Mantup

selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA,**

N a m a : Dr. H. YUHRONUR EFENDI, MBA.

Jabatan : Bupati Lamongan

Selaku atasan langsung dari **PIHAK PERTAMA,** selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA.**

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan, keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Lamongan, Januari 2023

**PIHAK KEDUA
BUPATI LAMONGAN**

Dr. H. YUHRONUR EFENDI, MBA.

**PIHAK PERTAMA
CAMAT MANTUP**

SUWANTO SASTRODIHARJO, S.STP., M.M.

Penata Tk. I

NIP. 19851010 200602 1 001

**LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
KECAMATAN MANTUP KABUPATEN LAMONGAN**

NO	SARARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Meningkatnya Manajemen Internal Perangkat Daerah	Nilai IKM	83,85
		Nilai SAKIP Kecamatan	81,14 (A)
2	Meningkatnya Pemberdayaan Desa	Jumlah Desa Mandiri	3 Desa
		Jumlah Desa Maju	10 Desa
		IKM Kecamatan	86,00
		Persentase Penyelenggaraan Pelayanan Publik yang Tepat Waktu	100%
		Persentase Desa yang Melaksanakan Pemberdayaan Terhadap Masyarakat	100%
		Persentase Urusan Pemerintahan Umum yang Diselenggarakan	100%
		Persentase Desa Naik Kelas	33,33%

NO	PROGRAM	ANGGARAN	KET.
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp 2.350.907.600,-	APBD
2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Rp 26.241.400,-	APBD
3	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Rp 55.240.750,-	APBD
4	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Rp 13.279.600,-	APBD
5	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Rp 36.485.650,-	APBD
JUMLAH		Rp 2.482.155.000,-	

Lamongan, Januari 2023

**PIHAK KEDUA
BUPATI LAMONGAN**

**PIHAK PERTAMA
CAMAT MANTUP**

Dr. H. YUHRONUR EFENDI, MBA.

SUWANTO SASTRODIHARJO, S.STP., M.M.

Penata Tk. I

NIP. 19851010 200602 1 001



**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
KECAMATAN MANTUP KABUPATEN LAMONGAN**

Dalam rangka mewujudkan manajemen Pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

N a m a : **SUWANTO SASTRODIHARJO, S.STP., M.M.**

Jabatan : Camat Mantup

selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**,

N a m a : **Dr. H. YUHRONUR EFENDI, MBA.**

Jabatan : Bupati Lamongan

Selaku atasan langsung dari **PIHAK PERTAMA**, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan, keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Lamongan, Oktober 2023

**PIHAK KEDUA
BUPATI LAMONGAN**

**PIHAK PERTAMA
CAMAT MANTUP**

Dr. H. YUHRONUR EFENDI, MBA.

SUWANTO SASTRODIHARJO, S.STP., M.M.

Pembina

NIP. 19851010 200602 1 001

**LAMPIRAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
KECAMATAN MANTUP KABUPATEN LAMONGAN**

NO	SARARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Meningkatnya Manajemen Internal Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Kecamatan	83,40 (A)
2	Meningkatnya Pemberdayaan Desa	Jumlah Desa Maju	10 Desa

NO	PROGRAM	P-APBD 2023	KET.
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp 2.465.489.250,-	APBD
2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Rp 22.231.600,-	APBD
3	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Rp 38.065.750,-	APBD
4	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Rp 11.072.600,-	APBD
5	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Rp 31.282.800,-	APBD
JUMLAH		Rp 2.568.142.000,-	

Lamongan, Oktober 2023

**PIHAK KEDUA
BUPATI LAMONGAN**

**PIHAK PERTAMA
CAMAT MANTUP**

Dr. H. YUHRONUR EFENDI, MBA.

SUWANTO SASTRODIHARJO, S.STP., M.M.

Pembina
NIP. 19851010 200602 1 001

**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
KECAMATAN MANTUP KABUPATEN LAMONGAN
TAHUN 2021-2026**

INSTANSI	KECAMATAN MANTUP KABUPATEN LAMONGAN
TUGAS	Memimpin, merencanakan, mengatur, melaksanakan dan mengendalikan serta mengoordinasikan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum dan melaksanakan kewenangan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati.
FUNGSI	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perumusan dan penetapan bahan penyusunan rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Strategis, Rencana Kerja, Rencana Kerja dan Anggaran, Dokumen Pelaksanaan Anggaran, Perjanjian Kinerja, LAKIP, Laporan Keuangan, LPPD dan LKPJ Kecamatan; 2. Perumusan dan penetapan kebijakan teknis rencana operasional berupa petunjuk teknis dan Standar Operasional Prosedur serta mengkoordinasikan pelaksanaan program dan kegiatan di lingkungan Kecamatan; 3. Penyelenggaraan koordinasi dengan instansi lain terkait pelaksanaan tugas Camat; 4. Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum di tingkat Kecamatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaan urusan pemerintahan umum; 5. Penyelenggaraan koordinasi kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat; 6. Penyelenggaraan koordinasi upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum; 7. Penyelenggaraan koordinasi penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah; 8. Penyelenggaraan koordinasi pemeliharaan prasana dan sarana pelayanan umum lingkup Kecamatan; 9. Penyelenggaraan koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan; 10. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 11. Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di Kecamatan, antara lain: <ol style="list-style-type: none"> a. Penyelenggaraan perencanaan dan efektivitas kegiatan pelayanan kepada masyarakat di Kecamatan; b. Penyelenggaraan fasilitas percepatan Standar Pelayanan Minimal di wilayah kecamatan. 12. Penyelenggaraan sebagian kewenangan yang dilimpahkan oleh bupati kepada Camat; 13. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

No	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Definisi Operasional	Formulasi Perhitungan	Sumber Data	Penanggung Jawab
1	Meningkatnya Manajemen Internal Perangkat Daerah	Nilai IKM	Sesuai Permenpan No. 16 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat	Nilai Interval SKM	Hasil Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	Kecamatan Mantup
		Nilai SAKIP Kecamatan	Nilai SAKIP merupakan akumulasi penilaian dari komponen manajemen kinerja yang dievaluasi yaitu Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, Evaluasi Internal dan Pencapaian Kinerja.	Perhitungan Inspektorat	Inspektorat	
2	Meningkatnya Pemberdayaan Desa	Jumlah Desa Mandiri	Indikator ini menghitung jumlah Desa Mandiri di Kecamatan Mantup setiap tahunnya.	Jumlah Desa Mandiri	Dinas PMD/IDM	Kecamatan Mantup
		Jumlah Desa Maju	Indikator ini menghitung jumlah Desa Maju yang ada di Kecamatan Mantup setiap tahunnya.	Jumlah Desa Maju	Dinas PMD/IDM	

**TARGET INDIKATOR KINERJA UTAMA
KECAMATAN MANTUP KABUPATEN LAMONGAN
TAHUN 2021-2026**

NO	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN / SASARAN	KONDISI AWAL KINERJA	TARGET KINERJA TUJUAN ATAU SASARAN TAHUN KE-					KONDISI AKHIR
			2020	2022	2023	2024	2025	2026	
1	Meningkatnya Manajemen Internal Perangkat Daerah	Nilai IKM	81,78	83,22	83,85	84,48	85,11	85,73	85,73
		Nilai SAKIP Kecamatan	80,94	81,04	81,14	81,24	81,34	81,44	81,44
2	Meningkatnya Pemberdayaan Desa	Jumlah Desa Mandiri	0	2	3	4	5	6	6
		Jumlah Desa Maju	9	10	10	11	12	13	13


SUWANTO SASTRODIHARJO, S.STP., M.M
 Penata Tk.I
 NIP. 19851010 200602 1 001

CAPAIAN IKU IKD PERANGKAT DAERAH KABUPATEN LAMONGAN TAHUN 2023
PERANGKAT DAERAH KECAMATAN MANTUP

INDIKATOR	FORMULASI	REALISASI TAHUN 2022	TARGET KINERJA				REALISASI 2023				CAPAIAN 2023							
			TAHUN 2023	TW I	TW II	TW III	TW IV	TW I	TW II	TW III	TW IV	AKHIR TAHUN	TW I	TW II	TW III	TW IV	AKHIR TAHUN	
Indikator Tujuan RPJMD																		
1. Indeks Reformasi Birokrasi (RB)	Penilaian dari Kemenpan RB																	
Indikator Sasaran RPJMD																		
1. Nilai IKM	Nilai Interval SKM																	
2. Prosentase Peningkatan Jumlah Desa Mandiri	$\frac{\text{Jumlah Desa Mandiri}}{\text{Jumlah Desa}} \times 100\%$																	
Indikator Tujuan PD																		
1. Nilai IKM	Nilai Interval SKM																	
2. Jumlah Desa Mandiri	Jumlah Desa Mandiri	2	3			3					10			10			333,33%	333,33%
																	$333,33/100 \times 100$	$333,33/100 \times 100$
Indikator Sasaran PD																		
1. Nilai SAKIP Kecamatan	Penilaian dari Inspektorat	83.34	81.14					81.14										
2. Jumlah Desa Maju	Jumlah Desa Maju	13	10			10					5			5				
Indikator Program PD																		
1. Nilai IKM Internal Kecamatan	Nilai Interval SKM	85.98	86.00					86.00				86.13	86.13				100,15%	100,15%
2. Persentase Penyelenggaraan Pelayanan Publik yang Tepat Waktu	$\frac{\text{Jumlah Pelayanan Publik yang Dilayani Tepat Waktu}}{\text{Jumlah Pelayanan Publik yang Dilayani}} \times 100\%$	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		$3733/3733 \times 100$	$3500/3500 \times 100$	$875/875 \times 100$	$900/900 \times 100$	$1025/1025 \times 100$	$700/700 \times 100$	$893/893 \times 100$	$955/955 \times 100$	$1051/1051 \times 100$	$1201/1201 \times 100$	$4100/4100 \times 100$	$100/100 \times 100$	$100/100 \times 100$				
3. Persentase Desa yang Melaksanakan Pemberdayaan Terhadap Masyarakat	$\frac{\text{Jumlah Desa yang Melaksanakan Pemberdayaan Terhadap Masyarakat}}{\text{Jumlah Desa}} \times 100\%$	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		$15/15 \times 100$	$15/15 \times 100$	$15/15 \times 100$	$15/15 \times 100$	$15/15 \times 100$	$15/15 \times 100$	$15/15 \times 100$	$15/15 \times 100$	$15/15 \times 100$	$15/15 \times 100$	$15/15 \times 100$	$100/100 \times 100$	$100/100 \times 100$	$100/100 \times 100$	$100/100 \times 100$	$100/100 \times 100$	$100/100 \times 100$
4. Persentase Konflik yang Tertangani	$\frac{\text{jumlah Konflik yang Ditangani Kecamatan}}{\text{Jumlah Konflik yang Dilaporkan ke Kecamatan}} \times 100\%$																	
5. Persentase Urusan Pemerintahan Umum yang Diselenggarakan	$\frac{\text{Jumlah Urusan Pemerintahan yang Diselenggarakan}}{\text{Jumlah Urusan Pemerintahan}} \times 100\%$	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		$12/12 \times 100$	$12/12 \times 100$	$12/12 \times 100$	$12/12 \times 100$	$12/12 \times 100$	$12/12 \times 100$	$12/12 \times 100$	$12/12 \times 100$	$12/12 \times 100$	$12/12 \times 100$	$12/12 \times 100$	$100/100 \times 100$	$100/100 \times 100$	$100/100 \times 100$	$100/100 \times 100$	$100/100 \times 100$	$100/100 \times 100$
6. Persentase Desa Naik Kelas	$\frac{\text{Jumlah Desa yang Naik Kelas}}{\text{Jumlah Desa}} \times 100\%$	26.67%	33.33%			33.33%					80.00%		80.00%				240%	240%
		$4/15 \times 100$	$5/15 \times 100$			$5/15 \times 100$					$12/15 \times 100$		$12/15 \times 100$				$240/100 \times 100$	$240/100 \times 100$

Lamongan, Januari 2024


SUWANTO SASTRODIHARJO, S.STP., M.M
 Pembina
 NIP. 19851010 200602 1 001

Formulir E.81
Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah Lingkup Kabupaten/Kota
Renja Perangkat Daerah Kecamatan Mantup Kabupaten Lamongan
Periode Pelaksanaan : s.d Desember 2023

Indikator dan Target Kinerja Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang mengacu pada sasaran RKPD :
 - Meningkatkan Manajemen Internal Perangkat Daerah
 - Meningkatkan Pemberdayaan Desa

NO	Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2021 s/d 2026 (Akhir Periode Renstra PD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun Berjalan (Tahun n -1) /2023 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang di Evaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2023 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				5		6		7		8		9		10		11		12 = 8+9+10+11		13 = 6 + 12		14 = 13 / 5 x 100%		
				K	Rp..	K	Rp..	K	Rp..	K	Rp..	K	Rp..	K	Rp..	K	Rp..	K	Rp..	K	Rp..	K	Rp..	
1	Meningkatnya Manajemen Internal Perangkat Daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	IKM Kecamatan	89.00	2,477,294,010	85.98	2,000,859,361	86.00	2,465,489,250	-	385,793,235	-	706,217,998	-	430,997,394	86,13	766,188,662	86,13	2,289,197,289	86,13	4,290,056,650	96,78%	173.18%	Kec. Mantup
		Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja yang Disusun Tepat Waktu	6 Dok.	64,905,103	6 Dok.	28,141,500	6 Dok.	32,140,100	2 Dok.	-	1 Dok.	1,082,000	2 Dok.	2,996,000	1 Dok.	20,578,000	6 Dok.	24,656,000	6 Dok.	52,797,500	100%	81.35%	Kec. Mantup
		1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8 Dok.	25,000,000	8 Dok.	10,228,500	8 Dok.	11,119,700	2 Dok.	-	2 Dok.	-	2 Dok.	1,032,000	2 Dok.	7,078,000	8 Dok.	8,110,000	8 Dok.	18,338,500	100%	73.35%	Kec. Mantup
		2. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	7 Dok.	20,000,000	7 Dok.	8,145,500	7 Dok.	10,088,600	2 Dok.	-	1 Dok.	1,082,000	2 Dok.	1,057,000	2 Dok.	5,251,000	7 Dok.	7,390,000	7 Dok.	15,535,500	100%	77.68%	Kec. Mantup
		3. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Lap.	19,905,103	4 Lap.	9,767,500	4 Lap.	10,931,800	1 Lap.	-	1 Lap.	-	1 Lap.	907,000	1 Lap.	8,249,000	4 Lap.	9,156,000	4 Lap.	18,923,500	100%	95.07%	Kec. Mantup
		Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Keuangan yang Disusun Tepat Waktu	23 Peg.	1,713,544,267	23 Peg.	1,327,642,881	23 Peg.	1,496,751,550	23 Peg.	316,497,755	23 Peg.	487,912,080	23 Peg.	323,744,069	23 Peg.	333,651,470	23 Peg.	1,461,805,374	23 peg.	2,789,448,255	100%	162.79%	Kec. Mantup
		1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	12 Orang/ Bulan	1,671,674,267	12 Orang/ Bulan	1,310,615,881	12 Orang/ Bulan	1,475,290,000	12 Orang/ Bulan	316,497,755	12 Orang/ Bulan	486,827,580	12 Orang/ Bulan	323,744,069	12 Orang/ Bulan	326,784,970	12 Orang/ Bulan	1,453,854,374	12 Orang/ Bulan	2,764,470,255	100%	165.37%	Kec. Mantup
		2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Lap.	19,870,000	1 Lap.	6,279,500	1 Lap.	11,284,150	-	-	-	-	-	1 Lap.	4,472,500	1 Lap.	4,472,500	1 Lap.	10,752,000	100%	54.11%	Kec. Mantup	
		3. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	2 Lap.	22,000,000	2 Lap.	10,919,000	2 Lap.	10,177,400	-	-	1 Lap.	1,084,500	-	-	1 Lap.	2,394,000	2 Lap.	3,478,500	2 Lap.	14,397,500	100%	65.44%	Kec. Mantup
		Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Prosentase Pegawai yang Mendapatkan Layanan Kepegawaian dengan Baik	100%	25,020,670	100%	19,260,000	100%	21,763,500	100%	-	100%	-	100%	-	100%	14,980,000	100%	14,980,000	100%	34,240,000	100%	136.85%	Kec. Mantup
		1. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	35 Pake	25,020,670	35 Pake	19,260,000	35 Pake	21,763,500	-	-	-	-	-	35 Paket	14,980,000	35 Paket	14,980,000	35 Pake	34,240,000	100%	136.85%	Kec. Mantup	
		Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Persediaan Barang dan Jasa yang Tepat Waktu	5 Rek.	89,430,314	5 Rek.	72,806,100	5 Rek.	73,897,900	-	-	1 Rek.	2,270,800	2 Rek.	15,170,100	2 Rek.	32,957,900	5 Rek.	50,398,800	5 Rek.	123,204,900	100%	137.77%	Kec. Mantup
		1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	6 Paket	5,150,000	6 Paket	3,998,600	6 Paket	5,038,700	-	-	1 Paket	340,800	1 Paket	1,333,800	4 Paket	2,214,300	6 Paket	3,888,900	6 Paket	7,887,500	100%	153.16%	Kec. Mantup
		2. Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	46 Paket	23,886,500	46 Paket	20,196,500	46 Paket	24,159,600	-	-	-	12 Paket	6,765,300	34 Paket	10,540,100	46 Paket	17,305,400	46 Paket	37,501,900	100%	157.00%	Kec. Mantup	
		3. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	7 Paket	27,995,287	7 Paket	26,234,000	7 Paket	13,375,000	1 Paket	-	2 Paket	-	2 Paket	1,375,000	2 Paket	6,227,500	7 Paket	7,602,500	7 Paket	33,836,500	100%	120.86%	Kec. Mantup
		4. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	2 Jenis	4,000,000	2 Jenis	1,800,000	2 Jenis	4,000,000	2 Jenis	-	2 Jenis	450,000	2 Jenis	600,000	2 Jenis	750,000	2 Jenis	1,800,000	2 Jenis	3,600,000	100%	90.00%	Kec. Mantup
		5. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	5 Lap.	28,398,527	5 Lap.	20,577,000	5 Lap.	27,324,600	1 Lap.	-	1 Lap.	1,480,000	1 Lap.	5,096,000	2 Lap.	13,226,000	5 Lap.	19,802,000	5 Lap.	40,379,000	100%	142.19%	Kec. Mantup
		Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Prosentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana yang Dibutuhkan	100%	62,675,538	100%	30,032,000	100%	95,634,200	100%	-	100%	1,070,000	100%	749,000	100%	12,243,000	100%	14,062,000	100%	44,094,000	100%	70.35%	Kec. Mantup
		1. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	7 Unit	62,675,538	7 Unit	30,032,000	7 Unit	95,634,200	-	-	-	1,070,000	-	749,000	1 Unit	12,243,000	1 Unit	14,062,000	7 Unit	44,094,000	100%	70.35%	Kec. Mantup

		Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase Layanan Jasa Penunjang yang Tersedia dengan Baik	100%	389,926,077	100%	347,589,380	100%	365,107,000	100%	69,295,480	100%	118,183,118	100%	82,838,225	100%	88,229,992	100%	358,546,815	100%	706,136,195	100%	181.09%	Kec. Mantup
		1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Lap.	41,300,000	12 Lap.	22,236,400	12 Lap.	29,769,000	3 Lap.	-	3 Lap.	5,076,138	3 Lap.	12,009,245	3 Lap.	10,900,012	12 Lap.	27,985,395	12 Lap.	50,221,795	100%	121.60%	Kec. Mantup
		2. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Lap	18,135,000	4 Lap	8,480,000	4 Lap	13,490,000	1 Lap.	-	1 Lap.	1,750,000	1 Lap.	1,500,000	1 Lap.	7,940,000	4 Lap.	11,190,000	4 Lap	19,670,000	100%	108.46%	Kec. Mantup
		3. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	14 Lap.	330,491,077	14 Lap.	316,872,980	14 Lap.	321,848,000	4 Lap.	69,295,480	4 Lap.	111,356,980	3 Lap.	69,328,980	3 Lap.	69,389,980	14 Lap.	319,371,420	14 Lap.	636,244,400	100%	192.51%	Kec. Mantup
		Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase Barang Milik Daerah dalam Kondisi Baik	100%	131,792,041	100%	176,509,500	100%	380,195,000	100%	-	100%	95,700,000	100%	5,500,000	100%	263,548,300	100%	364,748,300	100%	541,257,800	100%	410.69%	Kec. Mantup
		1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	8 Unit	2,000,000	8 Unit	1,789,500	8 Unit	2,000,000	-	-	-	-	-	8 Unit	1,289,300	8 Unit	1,289,300	8 Unit	3,078,800	100%	153.94%	Kec. Mantup	
		2. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	8 unit	29,792,041	8 unit	26,770,000	8 unit	29,992,500	-	1 Unit	2,600,000	2 Unit	5,500,000	5 Unit	9,675,000	8 unit	17,775,000	8 unit	44,545,000	100%	149.52%	Kec. Mantup	
		3. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Gedung	100,000,000	2 Gedung	147,950,000	2 Gedung	348,202,500	-	1 Gedung	93,100,000	-	-	1 Gedung	252,584,000	2 Gedung	345,684,000	2 Gedung	493,634,000	100%	493.63%	Kec. Mantup	
2	Meningkatnya Pemberdayaan Desa	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase Penyelenggaraan Pelayanan Publik yang Tepat Waktu	100%	31,504,889	100%	8,356,000	100%	22,231,600	100%	-	100%	-	100%	-	100%	3,704,000	100%	3,704,000	100%	12,060,000	100%	38.28%	Kec. Mantup
		Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Jumlah Koordinasi/Fasilitasi pelayanan Publik Kecamatan	15 Jenis	31,504,889	15 Jenis	8,356,000	15 Jenis	22,231,600	15 jenis	-	15 jenis	-	15 jenis	-	15 jenis	3,704,000	15 jenis	3,704,000	15 Jenis	12,060,000	100%	38.28%	Kec. Mantup
		1. Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	2 Lap.	31,504,889	2 Lap.	8,356,000	2 Lap.	22,231,600	-	1 Lap.	-	-	-	1 Lap.	3,704,000	2 Lap.	3,704,000	2 Lap.	12,060,000	100%	38.28%	Kec. Mantup	
3		Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Desa yang Melaksanakan Pemberdayaan Terhadap Masyarakat	100%	55,430,293	100%	33,801,500	100%	29,065,750	100%	-	100%	-	100%	8,359,000	100%	22,518,000	100%	30,877,000	100%	64,678,500	100%	116.68%	Kec. Mantup
		Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Desa yang Koordinasi Pemberdayaan Desa	15 Desa	55,430,293	15 Desa	33,801,500	15 Desa	29,065,750	15 Desa	-	15 Desa	-	15 Desa	8,359,000	15 Desa	15,515,000	15 Desa	23,874,000	15 Desa	57,675,500	100%	104.05%	Kec. Mantup
		1. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	15 Lembaga	55,430,293	15 Lembaga	23,808,500	15 Lembaga	29,065,750	15 Lembaga	-	-	-	-	8,359,000	15,515,000	15 Lembaga	23,874,000	15 Lembaga	47,682,500	100%	86.02%	Kec. Mantup	
		Kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat Melalui Gerakan PKK Tingkat Kecamatan yang Dilaksanakan	1 Lap.	9,000,000	-	-	1 Lap.	9,000,000	-	-	-	-	-	1 Lap.	7,003,000	1 Lap.	7,003,000	1 Lap.	7,003,000	0.00%	77.81%	Kec. Mantup	
		1. Peningkatan Kelahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kelahanan Pangan Keluarga	45 Keluarga	9,000,000	-	-	45 Keluarga	9,000,000	-	-	-	-	-	45 Keluarga	7,003,000	45 Keluarga	7,003,000	45 Keluarga	7,003,000	100.00%	77.81%	Kec. Mantup	
4		Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Urusan Pemerintahan Umum yang Diselenggarakan	100%	16,975,747	100%	8,809,000	100%	11,072,600	100%	-	100%	-	100%	-	100%	-	100%	-	100%	8,809,000	100%	51.89%	Kec. Mantup
		Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penguasan Kepala Daerah	Jumlah Koordinasi Urusan Pemerintahan Umum	4 Rapat	16,975,747	4 Rapat	8,809,000	4 Rapat	11,072,600	1 Rapat	-	1 Rapat	-	1 Rapat	-	4 Rapat	-	4 Rapat	8,809,000	100%	51.89%	Kec. Mantup		
		1. Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Laporan Konflik yang Dilangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	15 Lap.	16,975,747	15 Lap.	8,809,000	15 Lap.	11,072,600	4 Lap.	-	4 Lap.	-	3 Lap.	-	4 Lap.	-	15 Lap.	-	15 Lap.	8,809,000	100%	51.89%	Kec. Mantup
5		Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Desa Naik Kelas	53,33%	47,932,319	26.67%	28,248,000	33,33%	36,485,650	-	-	-	-	80%	1,975,000	23,300,000	80%	25,275,000	80%	53,523,000	100%	111.66%	Kec. Mantup	
		Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Desa yang Dilakukan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	15 Desa	47,932,319	15 Desa	28,248,000	15 Desa	31,282,800	15 Desa	-	15 Desa	-	15 Desa	1,975,000	15 Desa	23,300,000	15 Desa	25,275,000	15 Desa	53,523,000	100%	111.66%	Kec. Mantup

	1. Fasilitas Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	5 Dok.	15,000,000	5 Dok.	10,833,500	5 Dok.	10,775,400	1 Dok.	-	1 Dok.	-	1 Dok.	-	2 Dok.	8,650,000	5 Dok.	8,650,000	5 Dok.	19,483,500	100%	129.89%	Kec. Mantup
	2. Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	5 Dok.	20,000,000	5 Dok.	10,127,500	5 Dok.	10,928,000	1 Dok.	-	1 Dok.	-	1 Dok.	-	2 Dok.	9,433,000	5 Dok.	9,433,000	5 Dok.	19,560,500	100%	97.80%	Kec. Mantup
	3. Fasilitas Penyelenggaraan Keterteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Fasilitas dalam Rangka Penyelenggaraan Keterteraman dan Ketertiban Umum	12 Dok.	12,932,319	12 Dok.	7,287,000	12 Dok.	9,579,400	3 Dok.	-	3 Dok.	-	3 Dok.	1,975,000	3 Dok.	5,217,000	12 Dok.	7,192,000	12 Dok.	14,479,000	100%	111.96%	Kec. Mantup
Rata - rata Capaian Kinerja (0 %)																							
Predikat kerja																							
Faktor pendorong Keberhasilan Kinerja : Perencanaan yang matang dalam penyusunan rencana kinerja; Koordinasi dan pemahaman tugas yang baik oleh seluruh pegawai PD.																							
Faktor penghambat Pencapaian Kinerja : Kurangnya tertib administrasi dalam pembuatan laporan hasil pelaksanaan kegiatan dikarenakan kuantitas dan kapasitas SDM yang kurang; Sarana dan Prasarana kantor yang belum cukup memadai.																							
Tindak lanjut yang diperlukan dalam tribulan berikutnya*) :																							
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja PD berikutnya*) :																							
*) Diisi oleh Kepala BAPPELITBANGDA :																							